

# Kolut Jadi Percontohan Kabupaten dan Kota Lain di Sultra Terkait Desa Presisi

**Kendari, SultraNET.** | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, memimpin rapat strategis yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Penghubung Kolaka Utara di Kendari pada Sabtu (30/9). Dalam rapat tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menggarisbawahi urgensi menggabungkan sistem Desa Presisi dengan sensus untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data di tingkat desa.

Menyadari peran penting data yang akurat dalam proses pengambilan kebijakan, Kolaka Utara telah menjadi daerah percontohan dalam implementasi Desa Presisi. Keberhasilan inisiatif ini menarik minat beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara untuk mempelajari pengalaman dan praktek terbaik dari Kolaka Utara.

Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan niatnya untuk mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia juga memaparkan rencana untuk mengintegrasikan perencanaan penataan usaha dengan pendampingan Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik (SPBE). Selain itu, ia menyoroti pentingnya kios informasi yang kuat, yang mampu menyajikan data terperinci mengenai sektor kakao dan informasi lainnya.

“Penerapan Desa Presisi di Kolaka Utara dilihat sebagai penghargaan bagi daerah kita karena membantu desa memiliki data berkualitas. Data yang akurat dan tepat adalah fondasi bagi pengambilan keputusan pemerintah yang cerdas, sesuai dengan prinsip good data good decision, bad data bad decision, and no data no decision,”Katanya.

Dalam upaya memajukan transparansi dan akurasi data, Kolaka Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun Detailed Village Profiles (DDP) khususnya di 8 Desa se-Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Dalam DDP tersebut, terdapat 204 indikator yang mencakup informasi mengenai kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, serta data lahan pertanian dan infrastruktur desa.

Salah satu aspek penting yang dijelaskan dalam rapat adalah hubungan erat antara akurasi data dengan potensi desa. “Menyajikan data yang tepat dan akurat tentang potensi sumber daya alam suatu desa, seperti lahan perkebunan dan potensi kandungan mineral di dalamnya, adalah kunci dalam pengambilan kebijakan yang cerdas,” Katanya.

“Data yang valid, akurat, dan aktual akan membantu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perbaikan data monografi adalah langkah esensial dalam merencanakan pembangunan di desa,” Jelasnya. (KinfoKolut)

---

## **Rapat paripurna DPRD Bombana Setujui Perubahan APBD TA 2023**

**Bombana, SultraNET.** | Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si, mewakili Pj. Bupati Bombana, hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang digelar pada Jumat (29/9/2023) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana.

Rapat tersebut mengambil agenda utama, yaitu “Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.”

Dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati Bombana yang dibacakan oleh Sekda Man Arfa, Pj. Bupati Bombana menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bombana serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan, perumusan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Beliau mengapresiasi kerja keras yang dilakukan dalam setiap tahapan hingga Rancangan Perda Perubahan APBD TA 2023 dapat disetujui bersama secara tepat waktu.

“Sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama ini, Raperda Perubahan APBD TA 2023 akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan,” ujarnya.

Setelah penyampaian Pendapat Akhir Bupati Bombana, rapat dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bombana tentang Persetujuan Penetapan Raperda Kabupaten Bombana tentang Perubahan APBD TA 2023 menjadi Perda Kabupaten Bombana tentang Perubahan APBD TA 2022 oleh Sekretaris DPRD Kab. Bombana.

Puncak acara Rapat Paripurna ditandai dengan Penandatanganan Keputusan DPRD Kab. Bombana oleh Ketua DPRD, disaksikan oleh seluruh anggota DPRD.

Selain itu, dilakukan juga Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kab. Bombana dan Pj. Bupati Bombana, diwakili oleh Sekda Bombana. Penyerahan Surat Keputusan DPRD dan MoU Persetujuan Bersama dilakukan secara simbolis sebagai langkah konkrit dalam pelaksanaan perubahan APBD Kabupaten Bombana.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana ini menandai langkah penting dalam proses legislasi dan pengelolaan anggaran daerah, sekaligus memperkuat kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bombana. (Kominfo)

---

# Kecamatan Watunohu Kolut Terpilih Proyek Percontohan Inisiatif Desa Presisi di Sultra

**Kendari, SultraNET.** | Kecamatan Watunohu di Kabupaten Kolaka Utara telah dipilih sebagai proyek percontohan untuk inisiatif Desa Presisi. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun desa secara lebih presisi di Sulawesi Tenggara, dengan tujuan utama menyediakan data yang valid dan tepat untuk perencanaan

pembangunan yang akurat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (29/9) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara,

Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto Toding, MSP, MA melaporkan implementasi Data Desa Presisi (DDP), yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan kecepatan dalam memberikan gambaran kondisi aktual desa. Data ini dihasilkan melalui partisipasi warga desa yang dibantu oleh pihak luar seperti perguruan tinggi, dengan biaya relatif terjangkau. Data Presisi ini meliputi tiga tipe data, termasuk data spasial dengan tingkat akurasi tinggi hingga 5 cm, data numerik menggunakan aplikasi merdesa, serta data kualitatif atau deskriptif.

“Implementasi DDP melibatkan 8 desa di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, dengan keterlibatan warga desa sebagai enumerator. Proyek ini memperoleh dukungan finansial sebesar Rp 639.999.360, dengan 65% dari anggaran digunakan untuk pelatihan, FGD, honorarium enumerator, dan sejenisnya, serta 35% digunakan untuk operasional lainnya,” jelasnya.



Foto Bersama usai pelaksanaan Rakor

Kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menghasilkan Data Desa Presisi (DDP) untuk

delapan desa di Kecamatan Watunohu. “Kolaborasi ini diharapkan memberikan wawasan penting mengenai potensi desa, aspek ekonomi, dan infrastruktur untuk mendukung kebijakan pembangunan yang terinformasi dan tepat sasaran,” jelasnya.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (purn) Andap Budhi Revianto memberikan dorongan khusus untuk mengembangkan DDP dan menunjuk Kolaka Utara sebagai daerah percontohan untuk penyediaan data ini. DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Konektivitas data yang akurat dengan potensi desa menjadi aspek krusial dalam proses ini. Data yang tepat mengenai luas lahan pertanian dan potensi mineral menjadi dasar bagi kebijakan alokasi anggaran dan pengelolaan sektor pertambangan, yang mempengaruhi status desa, apakah termasuk dalam kategori desa berkembang atau tertinggal

Dengan tersedianya DDP, diharapkan Kolaka Utara dapat mengatasi tantangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat di tingkat desa. Semoga langkah awal ini membawa manfaat besar bagi masyarakat pedesaan dan membuka pintu menuju perkembangan yang lebih baik bagi daerah ini, mengintisari semangat transformasi di masa mendatang. (Kolutkab)

---

## **Pj. Bupati Buton Hadiri Rakor Forkopimda Sultra Terkait Data Presisi**

**Kendari, SultraNET.** | Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara

(Sultra), para bupati/walikota, serta akademisi dalam rangka “Mewujudkan Sultra Maju dan Sejahtera” berbasis data di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Jumat, 29 September 2023.

Pejabat Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. dalam acara tersebut memberikan arahan dan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Sultra agar mengadopsi Program Desa Presisi (DDP) sebagaimana telah dilakukan Pemda Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Saat ini implementasi Data Desa Presisi telah diterapkan pada delapan Desa di Kabupaten Kolaka Utara, salah satunya di Kecamatan Watunohu.

“Saya harap semua Kabupaten dan Kota di Sultra bisa mengadopsi DDP, karena manfaatnya sangat besar bagi pembangunan,” kata Pj. Gubernur Sultra.

DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Selanjutnya, Pj Gubernur Sultra meminta dukungan dari DPRD Sultra agar formulasi DDP masuk dalam agenda Prolegda prioritas 2023, sehingga dapat berkelanjutan.



# Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H/2023 M

**Bombana, SultraNET.** | Pemerintah Kabupaten Bombana mengadakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H/2023 M di Masjid Agung Nurul Iman Kasipute. Acara dihadiri oleh Asisten II Setda Bombana, H. Muhammad Aris, SE, yang mewakili Pj. Bupati Bombana, Pj. Ketua TP PKK Kab. Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Forkopimda Kab. Bombana, Para Kepala OPD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, bersama staf dan masyarakat. Kamis (28/09/2023),

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya rangkaian ibadah, melainkan juga momentum silaturahmi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Lebih dari sekadar ritual keagamaan, acara ini menjadi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah SWT yang mengutus suri tauladan bagi seluruh umat Muslim.

Dalam sambutan Pj. Bupati Bombana yang disampaikan oleh Asisten II Setda Bombana, H. Muhammad Aris, tema “Meneladani Akhlak Rasulullah Untuk Memperkokoh Kebersamaan dan Kepedulian Dengan Sesama” menjadi pangkal untuk mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah agar terus menggali inspirasi dari sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

“Hendaknya kita mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan Rasulullah SAW dalam aktivitas sehari-hari, dengan peduli terhadap sesama, terutama dalam tugas melayani masyarakat. Harapan kita, Kabupaten Bombana menjadi lebih sejahtera melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

H. Muh. Aris menekankan bahwa penerapan sikap dan perilaku Rasulullah akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia berharap bahwa peringatan ini dapat menghidupkan semangat swadaya dan gotong royong di masyarakat, yang pada gilirannya mempererat persatuan dan kesatuan.

Dalam penutup sambutannya, Asisten II mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkokoh keimanan dan kebersamaan sebagai kontribusi aktif dalam memajukan daerah. “Mari kita bersama-sama membangun daerah ini dengan

mendukung program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tandasnya, mengajak semua untuk berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Bombana

---

## **Pj. Ketua TP-PKK Bombana Aktif dalam Penilaian Lomba Posyandu**

**Bombana, SultraNET.** | Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, selaku Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, turut serta dalam penilaian Lomba Posyandu, Kesehatan Lingkungan (Kesling), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Lantowua Kec. Rarowatu Utara dan Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya. Dalam kunjungannya, Hj. Fatmawati bersama Tim Penilai dari Tim Penggerak PKK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana melibatkan diri aktif dalam menilai berbagai aspek lomba. Kamis (28/9/2023)

Kunjungan ini disambut hangat oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat, yang menghadirkan tarian khas daerah dan menyampaikan buket bunga sebagai tanda penghargaan kepada istri orang nomor 1 di Kabupaten Bombana itu.



Tarian penyambutan Pj. Ketua TP-PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos

Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati menguraikan beberapa indikator penilaian Lomba Posyandu, antara lain cakupan pelayanan, partisipasi masyarakat, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian ASI eksklusif, Kesling, dan PHBS.

Ia menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh kader posyandu yang berpartisipasi dalam lomba, sambil mengharapkan bahwa kegiatan ini dapat memupuk semangat kader posyandu untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

“Kader Posyandu harus berperan aktif dalam menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bombana,” tegasnya. (Kominfo)

---

# DPRD Kolaka Utara Setujui 4 Raperda

**Lasusua, SultraNET.** | Pada rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini Rabu (27/9/2023), anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara membacakan dan memberikan pendapat akhir terkait beberapa aspek yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara; Pengelolaan Keuangan Daerah; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pandangan fraksi dibacakan oleh anggota DPRD Kolaka Utara Oleh H.Baharuddin dari fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa Fraksi Demokrat menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah yang digunakan dari APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Demokrat mengingatkan perluasan prioritas program untuk memenuhi aspirasi masyarakat

“Fraksi Demokrat menekankan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) PDAM Patampanua di Kabupaten Kolaka Utara untuk mengatur tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menetapkan biaya atau tarif yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola perusahaan,”Katanya.

Sementara Fraksi Persatuan Pembangunan menyoroti prioritas program yang harus mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan PAD, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Mereka juga mengingatkan untuk memperhatikan pengelolaan PDAM agar meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan air.

Fraksi Bulan Bintang mengapresiasi Ranperda Perubahan APBD 2023 sebagai pemacu pembangunan dan berharap implementasinya dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat dalam membahas Ranperda ini.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mendorong penggunaan alokasi anggaran dengan cermat dan memaksimalkan manfaatnya untuk mendukung perekonomian masyarakat. Mereka juga meminta perhatian terhadap anggaran kecamatan dan kelurahan.

Fraksi Karya Indonesia Raya menekankan penanganan isu sosial terkait PKH, peningkatan pelayanan PDAM, dan responsif terhadap permintaan masyarakat yang disampaikan melalui proposal.

Fraksi PDI Perjuangan ini berterima kasih kepada OPD atas kerjasamanya dalam pembahasan dan berharap target PAD dapat tercapai. Mereka juga mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan batas waktu.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2023, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kolaka Utara, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pencegahan serta Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah melalui pembahasan dan harmonisasi. DPRD Kolaka Utara menyepakati untuk menetapkan peraturan daerah ini, dengan harapan dapat membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kolaka Utara. Semoga implementasi peraturan ini berjalan efektif untuk kesejahteraan masyarakat. (BeritaKolutKab)

---

# **Pj. Bupati Bombana Raih Penghargaan Sultra Award 2023 Sebagai Tokoh Perubahan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat**

**Kendari, SultraNET.** | Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Penjabat Bupati Bombana, meraih penghargaan Sultra Award 2023 sebagai Tokoh Perubahan Pelopor

Pemberdayaan Masyarakat dari Harian Kendari Pos. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Utama PT. Fajar Corporation Indonesia, Suhendro Boroma, di Claro Hotel Kendari. Rabu (27/9/2023).

Selama menjabat, Ir. H. Burhanuddin terus mengimplementasikan inovasi untuk memberdayakan masyarakat Bombana, baik dari segi potensi alam maupun potensi individu setiap warga. Inisiatif tersebut menjadikan H. Burhanuddin sebagai penerima penghargaan Sultra Award 2023.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi Pj. Bupati Bombana dalam mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program One Village One Product.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan bahwa penghargaan ini memberikan semangat tambahan bagi dirinya dan seluruh jajaran Pemerintah Kab. Bombana untuk terus bekerja profesional dalam pembangunan daerah.



Pj. Bupati Bombana, H. Burhanuddin

Program One Village One Product menjadi landasan untuk meningkatkan ekonomi desa dengan memperkenalkan produk unggulan masing-masing desa. Pj. Bupati berharap produk-produk tersebut dapat bersaing di pasar modern, tidak hanya di Kabupaten Bombana, tetapi juga di seluruh Sulawesi Tenggara dan wilayah lain di Indonesia.

“Kita ingin seluruh produk unggulan Bombana dapat dipasarkan luas, bukan hanya di Bombana, tetapi juga di daerah lain di Sultra dan di luar Sultra,” ujar H. Burhanuddin, menekankan upaya untuk memperluas pangsa pasar produk unggulan daerah. (\*)

---

## **PC Muslimat NU Kolaka Dilantik**

**Kolaka, SultraNET.** | PC Muslimat NU Kabupaten Kolaka masa Khidmat 2022-2027, menggelar pelantikan pengurus dan rapat kerja yang bertemakan “Meningkatkan Peran Muslimat NU ditahun Moderasi”, bertempat di Hotel Sutan Raja Kolaka. Rabu, (27/09)

Ketua Muslimat NU Kolaka terpilih Andi Wahidah menyebutkan, kegiatan kali ini bertujuan untuk memperkuat peran perempuan Indonesia dalam memajukan peradaban dunia. Menurutnya, perempuan harus punya andil dalam menciptakan peradaban.

“Dengan kepengurusan baru ini semoga seluruh Muslimat NU Kabupaten Kolaka bisa lebih maju serta solid, mandiri dan ikhlas dalam membangun peradaban.” tegasnya

Ia juga berkomitmen untuk memajukan peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama .

Sementara itu, Asisten II menyampaikan bahwa Muslimat NU bersama organisasi wanita lainnya di Kabupaten Kolaka merupakan ujung tombak untuk menyelesaikan berbagai problematika di Kolaka.

“Semoga Muslimat NU tetap berjalan beriringan bersama pemerintah untuk terus membangun dan mensejahterahkan Kab. Kolaka di berbagai bidang.” sebutnya.

---

# Bappeda Gelar “Kick off Meeting” Mulai Bahas RPJPD Bombana Hingga 20 Tahun Kedepan

**Bombana, SultraNET.** | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana tahun 2025-2045. Rabu (27/9/2023).

Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa saat menyampaikan sambutan mewakili Penjabat Bupati Bombana mengatakan kegiatan Kick Off Meeting tersebut merupakan momentum yang sangat strategis sebagai penanda awal dimulainya seluruh rangkaian dan tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana Periode 20 tahun mendatang.

Mantan Kadis PUTR Bombana itu menyebut, kegiatan Kick Off merupakan kegiatan yang sangat penting untuk kemajuan daerah, untuk itu ia berharap agar seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bombana dapat bersama-sama mendukung dan memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah dan sustainabel serta mendukung target pembangunan nasional menuju indonesia emas tahun 2045.

“Amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah Kabupaten dan kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional,” ujar Man Arfa.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan.

Ia menyebut pelaksanaan RPJPD kabupaten bombana pada tahun 2005-2025 telah berjalan selama 18 tahun, sehingga beberapa capaian kinerja indikator makro pembangunan kabupaten bombana sudah dapat dilaksanakan.

Capaian dimaksud yaitu PDRB per kapita kabupaten bombana meningkat lebih dari 10 kali lipat dari awal RPJPD, dimana pada tahun 2005 pendapatan perkapita sebesar 4,8 juta meningkat menjadi 50,75 juta pada tahun 2022.

“Seiring dengan peningkatan PDRB perkapita, angka kemiskinan dan angka pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan,” bebernya

Angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 26,17 persen menurun menjadi 10,26 persen pada tahun 2022. Angka pengangguran pada tahun 2005 sebesar 15,81 persen turun menjadi 1,47 persen pada tahun 2022.

Tingkat ketimpangan pendapatan yang biasa di ukur dengan indeks gini, dalam 18 tahun terakhir terjadi sedikit kenaikan dimana pada tahun 2005 indeks gini sebesar 0,320 meningkat menjadi 0,370 pada tahun 2022. Indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan capaian yang semakin membaik dimana pada tahun 2005 angka IPM sebesar 63,80 poin menjadi 66,81 poin di tahun 2022.

“Melihat capaian pembangunan yang tergambar dari capaian indikator makro, kita sepatutnya merasa bersyukur. Selain itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders pembangunan, terutama kepada Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat atas segala usaha kita dalam memajukan wonua bombana yang kita cinta ini,” beber Man Arfa.

Ia mengajak seluruh stakeholder pembangunan di kabupaten bombana untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi berupa saran, masukan dan harapannya terhadap pembangunan kabupaten bombana dalam 20 tahun kedepan yang akan diterjemahkan dalam dalam visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rpjpd kabupaten bombana tahun 2025-2045.

Demi efektivitas penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 ini, ia berpesan tetap memperhatikan tahapan proses penyusunan RPJPD agar tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, perlu pula memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya serta sinergitas dengan dokumen RPJPD provinsi dan RPJP nasional serta masukan dari seluruh stakeholders pembangunan.

“Mengingat pentingnya kick off meeting RPJPD ini, kepada seluruh stakeholder dapat mengikuti dengan baik. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan

pembangunan kabupaten bombana akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta dapat menjawab isu-isu strategis kedepan,” tandasnya

Berdasarkan laporan panitia, jumlah peserta sebanyak 250 orang yang terdiri dari pimpinan DPRD Bombana, Forkopimda, perangkat daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah, Instansi Vertikal, Perusahaan Daerah, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Anak Serta Stakeholdr terkait. (IS)